

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan merupakan isu krusial yang sedang melanda seluruh dunia. Dalam studi Hubungan Internasional, kerja sama internasional sudah mengalami perpindahan topik dari isu tradisional seperti keamanan dan militer menjadi isu non tradisional seperti perubahan iklim yang ekstrim, sehingga dibutuhkan kontribusi banyak negara untuk menangani hal ini. Berbagai upaya mencapai target *Net-Zero Emissions* semakin menjadi fokus negara-negara di dunia untuk menghadapi tantangan pemanasan global dan perubahan iklim.¹ Komitmen negara-negara yang terlibat dalam Protokol Kyoto telah bersepakat untuk menjaga laju penambahan konsentrasi dari emisi gas rumah kaca khususnya CO₂ dan gas berbahaya lainnya dengan target pengurangan 5,2% sebelum tahun 2012 dari jumlah awal tahun 1990.² Komitmen ini terus berkembang dengan pengembangan EBT (energi baru terbarukan) yang menjadi tren di dunia internasional melalui perlombaan kemajuan teknologi oleh berbagai negara termasuk Denmark.

Menurut World Energy Trilemma, Denmark merupakan negara Eropa dengan peringkat teratas dalam bidang keberlanjutan energi.³ Denmark mengungguli pengembangan energi terbarukan terutama dalam bidang angin dengan menjadi

¹ Meidiana Mulya Ningsih, “Pembangunan Ramah Lingkungan Terhadap Sub Sektor Energi Baru Dan Terbarukan Di Indonesia,” *Jurnal Energi Baru dan Terbarukan* 5, no. 2 (2024): 12–29, <https://doi.org/10.14710/jebt.2024.22805>.

² Ningsih, “Pembangunan Ramah Lingkungan Terhadap Sub Sektor Energi Baru Dan Terbarukan Di Indonesia.”

³ “Denmark Tops Global Ranking in Energy Systems, Security Equity, and Sustainability,” Invest In Denmark, diakses 7 Maret 2025, <https://investindk.com/insights/denmark-tops-global-ranking-in-energy-systems-security-equity-and-sustainability>.

produsen turbin angin terbesar dunia.⁴ Denmark berhasil menghindari kemungkinan krisis ekonomi seperti inflasi akibat embargo minyak yang dilakukan oleh The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) pada 1973 dengan memberi pajak terhadap energi tidak terbarukan dan terus melakukan pengembangan EBT sejak saat itu. Konsistensi Denmark dalam pengembangan EBT menjadikan Denmark sebagai negara yang paling aman energi berkelanjutannya di Organization of Economic Cooperation and Development (OECD).⁵

Tidak hanya mengembangkan teknologi transisi energi bersih dalam negeri, Denmark juga telah berkomitmen untuk membantu negara lain, khususnya negara berkembang dalam usaha transisi energi bersihnya menggunakan strategi diplomasi hijau, salah satunya pada program Strategic Sector Cooperation. Bersama Indonesia, Tiongkok, Afrika Selatan, Mexico, Brasil, dan vietnam, otoritas publik Denmark bekerja sama dengan mitra di sejumlah negara dengan ekonomi berkembang dan negara berpendapatan tinggi, mencapai pembangunan berkelanjutan dan menghasilkan nilai bagi Denmark dan perusahaan Denmark.⁶ Selain itu, Denmark telah berkomitmen dalam Perjanjian Paris untuk membantu sejumlah negara berkembang transisi karbon rendah pada program *Danish Energy Partnership Programme* (DEPP). DEPP merupakan program pemerintah Denmark untuk membantu negara-negara mitra, khususnya negara berkembang menuju

⁴ “Windmill_paper1.pdf,” t.t., diakses 16 Mei 2025, https://pure.au.dk/ws/files/12741/Windmill_paper1.

⁵ Benjamin K. Sovacool, “Energy policymaking in Denmark: Implications for global energy security and sustainability,” *Energy Policy* 61 (Oktober 2013): 829–39, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.06.106>.

⁶ “Strategic Sector Cooperation More Denmark in The World,” Trade-Council-EN, diakses 12 Maret 2025, <https://thetradecouncil.dk/en/services/growth/strategic-sector-cooperation>.

transisi energi bersih, berkelanjutan, dan efisien. Tujuan kerja sama ini adalah untuk mempromosikan kesadaran dan penggunaan energi Denmark dalam transisi hijau melalui kerja sama pemerintah-ke-pemerintah.⁷ Melalui Danish Energy Agency (DEA), kerja sama ini telah dijalankan bersama Tiongkok, Mexico, Vietnam, Afrika Selatan, dan Indonesia.⁸

Komitmen Indonesia dalam isu lingkungan pada Paris Agreement telah dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dengan misi mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan bantuan internasional sebesar 43,20% pada tahun 2030.⁹ Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi terbarukan mulai dari angin, air, tenaga matahari, panas bumi, energi laut, dan berbagai jenis *bio-energy* terutama *biomass*. Meskipun potensi sumber EBT yang cukup besar, pemanfaatannya belum digunakan secara maksimal dan masyarakat masih bergantung pada sumber energi tidak terbarukan.¹⁰ Maka dari itu, Indonesia membutuhkan bantuan dari luar untuk mempercepat transisi energi dalam negeri.

Hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Denmark telah dimulai sejak 1950 dan berkembang pada 1997 melalui Danish International Development Agency (DANIDA).¹¹ Menurut Menteri Luar Negeri Denmark, Kristian Jensen,

⁷ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Kerja Sama RI-Denmark ‘INDODEPP’ Segera Diimplementasikan,” ESDM, diakses 13 Maret 2025, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/berita-unit/kerja-sama-ri-denmark-indodepp-segera-diimplementasikan>.

⁸ Ministry of Foreign Affairs of Denmark dkk., “Danish Energy Partnership Programme (DEPP 2026) with China, Indonesia, Mexico, South Africa, and Vietnam,” 27 Maret 2025.

⁹ Septyanto Galan Prakoso dkk., “Analisis Diplomasi Soft Power Denmark Terhadap Indonesia (Studi Tentang Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan di Indonesia),” *Politica* 10 (Mei 2019).

¹⁰ Hanan Nugroho, “Transisi Energi Indonesia: Janji Lama Belum Terpenuhi,” *Bappenas Working Papers* 2, no. 2 (2019): 208–14, <https://doi.org/10.47266/bwp.v2i2.40>.

¹¹ The Jakarta Post, “Bright Future Seen for Indonesian-Danish Relations - World,” The Jakarta Post, diakses 7 Maret 2025, <https://www.thejakartapost.com/news/2015/10/09/bright-future-seen-indonesian-danish-relations.html>.

pada kunjungan Ratu Margrethe II dalam rangka 65 tahun hubungan bilateral kedua negara, Denmark ingin memperkuat kerja sama dengan Indonesia dikarenakan Indonesia memiliki kapasitas di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan dapat membantu Denmark dalam membangun jembatan yang kuat ke seluruh Asia Tenggara.¹² Di bidang energi, kerja sama kedua negara dimulai pada tahun 2008 dalam Emergency Support Program (ESP), yaitu ESP2 dengan promosi konservasi energi pada industri skala menengah dan besar. Indonesia mengimplementasikan kerja sama ini dalam Energy Efficiency and Conservation Clearing House Indonesia (EECCHI).¹³ Program ESP2 berakhir pada tahun 2012 dan ESP3 berakhir pada 2018, kerja sama kedua negara dilanjutkan dengan Strategic Sector Cooperation (SSC) yang berakhir pada 2021.¹⁴

Setelah SSC berakhir pada tahun 2021, Denmark dan Indonesia berniat melanjutkan kerja samanya melalui program kerja Indonesia-Denmark Energy Partnership Program (INDODEPP) dengan penandatangan MoU lanjutan dari kedua belah pihak pada 2020. Tujuan program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan energi bersih Indonesia secara berkelanjutan.¹⁵ Program ini diharapkan dapat mencapai target NDC, memenuhi *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 7 dan 13, serta target 23% energi terbarukan.¹⁶

¹² Post, “Bright Future Seen for Indonesian-Danish Relations - World.”

¹³ “Peluncuran Energy Efficiency and Conservation Clearing House Indonesia (EECCHI),” ESDM, diakses 18 Mei 2025, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/peluncuran-energy-efficiency-and-conservation-clearing-house-indonesia-eecchi>.

¹⁴ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Fokus Perpanjangan Kerja Sama Strategis RI-Denmark, Konkret Manfaatnya Untuk Daerah,” ESDM, diakses 7 Maret 2025, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/berita-unit/fokus-perpanjangan-kerja-sama-strategis-ri-denmark-konkret-manfaatnya-untuk-daerah>.

¹⁵ “Danish Energy Partnership Programme III, INDODEPP,” diakses 23 Maret 2025, <https://openaid.um.dk:443/>.

¹⁶ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Indonesia - Denmark Perkuat Kerja Sama Pengembangan Energi Terbarukan,” ESDM, diakses 23 Maret 2025, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/berita-unit/indonesia-denmark-perkuat-kerja-sama-pengembangan-energi-terbarukan-1>.

Dengan keseluruhan kerja sama antara Indonesia-Denmark yang telah terjalin hingga saat ini, belum terdapat dampak signifikan yang dirasakan oleh Indonesia. Hingga tahun 2023, penggunaan energi Indonesia masih didominasi oleh sumber energi fosil sebanyak 86,83% dari bauran energi primer nasional.¹⁷ Produksi batu bara Indonesia mencapai 117% dari target, dan pemanfaatan gas bumi domestik sebesar 67% yang mencerminkan dominasi energi fosil dan belum optimalnya penggunaan energi bersih dalam negeri.¹⁸ Lemahnya implementasi Indonesia pada komitmen terkait mitigasi perubahan iklim dan transisi energi mestinya menjadi perhatian dan pertimbangan bagi Denmark sebagai negara mitra.

Meskipun demikian, Denmark tidak mengurungkan niatnya untuk menyelesaikan program INDODEPP dengan Indonesia, kedua negara justru telah menyepakati kerja sama lanjutan di bidang energi dengan penandatangan Protokol perubahan dan tiga Memerandum Saling Pengertian (MSP) mengenai Energi Terbarukan dan Bersih, dan Konservasi Energi pada 2025.¹⁹ Dengan inisiasi kerja sama oleh Denmark, besaran dana yang telah dikeluarkan untuk membantu memenuhi kebutuhan EBT nasional Indonesia, dan minimnya praktik implementasi komitmen Indonesia terhadap mitigasi perubahan iklim, penelitian ini bertujuan menggali lebih dalam mengenai alasan pengambilan keputusan luar negeri Denmark sehingga Denmark ingin melanjutkan kerja sama dengan Indonesia di bidang energi.

¹⁷ Eniya Listiani Dewi, “Transisi Energi di Indonesia: Program, Tantangan, dan Dukungan Yang Diperlukan,” 13 Juni 2024.

¹⁸ “Kementerian ESDM RI - Media Center - Arsip Berita - Kinerja Sektor ESDM 2024: Lampui Target, Penuhi Kebutuhan Domestik, dan Tingkatkan Ketahanan Energi,” diakses 30 Mei 2025, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kinerja-sektor-esdm-2024-lampui-target-penuhi-kebutuhan-domestik-dan-tingkatkan-ketahanan-energi->.

¹⁹ “Perkuat Satu Dekade Kerja Sama, Indonesia-Denmark Sepakati Perluasan Kerja Sama Energi,” ESDM, diakses 18 Maret 2025, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/perkuat-satu-dekade-kerja-sama-indonesia-denmark-sepakati-perluasan-kerja-sama-energi>.

1.2 Rumusan Masalah

Kerja sama Indonesia-Denmark dalam sektor energi telah berlangsung cukup lama. Meskipun demikian, jika dilihat dari laporan dan evaluasi kerja sama, implementasi program menghadapi berbagai tantangan. Komitmen Indonesia yang lemah pada isu lingkungan dan energi, seperti pembabatan hutan, pertambangan, dan penggunaan bahan bakar bersih seharusnya menjadi pertimbangan dalam keberlanjutan kerja sama. Dengan kebijakan Denmark terkait keberlanjutan kerja sama energi dengan Indonesia tidak relevan dengan lemahnya komitmen Indonesia dalam upaya tersebut, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai masalah ini. Penelitian dikhawasukan untuk melihat alasan Denmark mempertahankan kerja sama energi antara Denmark-Indonesia dalam kebijakan luar negerinya. Pemilihan program INDODEPP oleh peneliti dilakukan karena program ini merupakan program terkini yang sedang berlangsung antara Denmark dan Indonesia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disajikan, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: “Apa faktor pendorong Denmark dalam kebijakannya mempertahankan kerja sama berbasis energi dengan Indonesia dalam program INDODEPP?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengambilan kebijakan luar negeri Denmark demi melihat faktor yang melatar belakangi keputusan Denmark untuk membantu Indonesia dalam pengembangan EBT pada program INDODEPP.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis: Penelitian ini secara akademis bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai analisa kepentingan melalui kebijakan luar negeri suatu negara, khususnya Denmark melalui program INDODEPP. Penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi diskusi publik khususnya dalam menganalisis kepentingan nasional suatu negara maju dalam kerja samanya dengan negara berkembang.

1.6 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lima penelitian sebelumnya untuk dijadikan rujukan dan pembanding dalam pengembangan materi penelitian. artikel jurnal pertama yang dijadikan sebagai referensi adalah artikel yang ditulis oleh Hasna Mandasari Tianotak, Melpayanty Sinaga, dan Marinus Yaung yang berjudul “Kerja Sama Indonesia dan Denmark Dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Di Indonesia” yang dipublikasikan pada Mei 2023. Artikel ini membahas kerja sama antara Indonesia dengan Denmark dalam pengembangan energi terbarukan yang berfokus pada pengembangan potensi Bayu di Indonesia.²⁰

Permintaan energi yang diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya membuat isu ini menjadi perhatian dunia. Fakta bahwa ketersediaan energi non terbarukan yang minim juga merupakan kekhawatiran yang harus segera

²⁰ Hasna Mandasari Tianotak dkk., “Kerja Sama Indonesia dan Denmark Dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Di Indonesia,” *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 3, no. 1 (2023): 74–87, <https://doi.org/10.31957/pjdir.v3i1.2649>.

diselesaikan dengan pengembangan pada EBT. Komitmen Indonesia dalam NDC memacu Indonesia untuk segera melakukan transisi energi dan dalam kasus ini, Indonesia memilih Denmark sebagai salah satu mitra strategis dalam upaya pengembangan EBT. Denmark dipilih sebab Denmark dipandang sebagai model dalam upaya pengembangan energi bersih terbarukan dengan segudang pengalaman.²¹

Dalam artikel ini, Tianotak, dkk. memaparkan beberapa kerja sama berbasis energi yang sebelumnya telah terjalin antara Denmark dan Indonesia. Kontribusi artikel ini adalah sebagai informasi tambahan, sebab dalam artikel ini menjelaskan skema kerja sama INDODEPP serta program-program yang terdapat di dalamnya. Dalam artikel ini juga disebutkan kerangka hukum yang mengatur kerja sama INDODEPP. Perbedaan artikel jurnal yang ditulis oleh tianotak, dkk. dengan penelitian ini adalah artikel jurnal ini menjelaskan bagaimana skema kerja sama ini terjalin dan berbagai program di dalamnya serta melihat potensi angin yang terdapat di Indonesia. Sedangkan penelitian ini ingin berfokus pada analisa kepentingan Denmark dalam bekerja sama dengan Indonesia khususnya dalam kerja sama INDODEPP ini melalui konsep pengambilan kebijakan luar negeri.

Referensi kedua yang peneliti gunakan adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Kharisma Annnisa Dewi dengan judul “Kepentingan Denmark dalam Pemberian Bantuan Lingkungan terhadap Indonesia Melalui *Environtmental Support Program Phase III (ESP3)*”.²² Artikel yang dipublikasikan pada tahun 2021 ini menjelaskan

²¹ Tianotak dkk., “Kerja Sama Indonesia dan Denmark Dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Di Indonesia.”

²² Kharisma Anissa Dewi, “Kepentingan Denmark dalam Pemberian Bantuan Lingkungan terhadap Indonesia Melalui Environmental Support Programme Phase III (ESP3),” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 2, no. 1 (2021): 51–61, <https://doi.org/10.15408/jisi.v2i1.23042>.

kepentingan nasional Denmark dalam pemberian bantuan pada program ESP3 dengan pendekatan Neorealisme menggunakan konsep kepentingan nasional. Artikel ini memuat jabaran program terdahulu kerja sama energi antara Indonesia dan Denmark, yaitu *Environmental Support Programme* (ESP) yang telah berjalan selama 3 periode, ESPS pada tahun 2005-2007, ESP II pada tahun 2008-2012, dan ESP III berjalan pada tahun 2013-2018. Artikel ini fokus pada alasan Denmark pada kerja sama periode terakhir yaitu ESP III dikarenakan program ini menjadi penutup pada rangkaian kerja sama ESP Indonesia dan Denmark setelah terjalin selama 13 tahun.²³

Artikel jurnal ini berkontribusi sebagai tambahan referensi bagi penulis dalam melihat alasan Denmark memberikan bantuan program energi bersih pada Indonesia. Artikel ini juga berperan dalam mengembangkan penelitian ini karena di dalamnya terdapat gambaran bagaimana Denmark memandang isu lingkungan sebagai bagian dari kepentingan nasionalnya dan Denmark berkomitmen dalam membantu negara-negara berkembang dalam melakukan transisi energi dan memenuhi kebutuhan energi nasionalnya. Perbedaan artikel jurnal yang ditulis oleh Kharisma dengan penelitian ini adalah berfokus pada program ESP III dengan kerangka analisa menggunakan pendekatan Neorealisme, sedangkan penelitian ini menganalisis kebijakan luar negeri Denmark dalam mempertahankan kerja sama energi pada program INDODEPP.

Referensi ketiga yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah artikel jurnal yang berjudul “Analisis Diplomasi *Soft Power* Denmark Terhadap Indonesia (Studi

²³ Dewi, “Kepentingan Denmark dalam Pemberian Bantuan Lingkungan terhadap Indonesia Melalui Environmental Support Programme Phase III (ESP3).”

Tentang Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan di Indonesia)”.²⁴ Dimulai dari pembahasan pada isu pemanasan global dan dampaknya bagi negara-negara pesisir, artikel ini memaparkan bagaimana aktivitas sehari-hari manusia dapat berdampak buruk bagi lingkungan, dan manusia itu sendirilah yang harus mengubahnya. Indonesia dan Denmark merupakan negara yang sangat berbeda, baik dari iklim maupun dari jarak yang sangat jauh, kedua negara tetap memiliki komitmen yang sama terhadap lingkungan. Kerja sama bilateral yang terjalin sudah berlangsung sejak lama dengan fokus pada artikel ini yaitu dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup Indonesia melalui berbagai proyek, dengan peran Denmark sebagai penyokong dan pendukung dengan memberi bantuan dana dan transfer teknologi. Artikel ini menyoroti upaya Denmark mengatasi masalah pemanasan global yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi negara berkembang.²⁵

Artikel ini berkontribusi dalam meperdalam pengetahuan peneliti mengenai proses terbentuknya kesepakatan kerja sama Indonesia dan Denmark, dengan menyoroti bagaimana Denmark mengimplementasikan diplomasi hijau dan pendekatan *soft power* sebagai strategi mencapai kepentingan nasionalnya sembari turut berkontribusi pada isu lingkungan. Artikel ini juga memuat tindakan dan proyek konkret yang terealisasi selama kerja sama bilateral kedua negara ini berlangsung. Perbedaan artikel dengan penelitian ini adalah artikel membahas konteks dan implmentasi diplomasi hijau Denmark, sedangkan penelitian ini membahas pengambilan kebijakan luar negeri Denmark dalam melanjutkan kerja sama energi kedua negara.

²⁴ Prakoso dkk., “Analisis Diplomasi Soft Power Denmark Terhadap Indonesia (Studi Tentang Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan di Indonesia).”

²⁵ Prakoso dkk., “Analisis Diplomasi Soft Power Denmark Terhadap Indonesia (Studi Tentang Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan di Indonesia).”

Artikel jurnal keempat yang penulis jadikan rujukan terdapat dalam sebuah jurnal yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan artikel berjudul “Realisasi Kebijakan Energi Terbarukan Uni Eropa (UE) Oleh Denmark dalam Menghadapi Ancaman Pemanasan Global” yang ditulis oleh Yovita Yiwananda dan Henny Nugrahani.²⁶ Sebagai negara anggota Uni Eropa, wajib bagi Denmark untuk merealisasikan kebijakan energi terbarukan sebagai bentuk komitmen Denmark pada isu lingkungan. Uni Eropa melihat pemanasan global sebagai salah satu ancaman utama dunia saat ini. Keberhasilan Denmark dalam mengubah sumber energi dalam negaranya menjadi sumber energi bersih membuatnya dianggap sebagai pelopor dalam pemanfaatan energi angin dan inovasi kebijakan lingkungan. Melalui pembentukan tiga badan nasional di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, Denmark membentuk sebelas poin strategi spesifik yang diharapkan dapat aktif mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan menargetkan transisi energi penuh kepada sumber energi bersih pada tahun 2030-2035.²⁷ Sebelas strategi tersebut utamanya menyasar pajak bagi perusahaan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca, wajib pajak bagi masyarakat yang menghasilkan CO₂, mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan ramah lingkungan, serta rencana penghapusan minyak dan batubara sebagai sumber energi pada 2030.

Artikel ini menggunakan teori keamanan oleh Barry Buzan yang melihat bahwa keamanan merupakan pertahanan diri ketika sebuah isu dapat mengancam

²⁶ Yovita Yiwananda dan Henny Nugrahani, “Realisasi Kebijakan Energi Terbarukan Uni Eropa (Uni Eropa) Oleh Denmark Dalam Menghadapi Ancaman Pemanasan Global,” *Intermestic: Journal of International Studies* 6 (November 2021): 121–46, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v6n1.7000>.

²⁷ Yiwananda dan Nugrahani, “Realisasi Kebijakan Energi Terbarukan Uni Eropa (Uni Eropa) Oleh Denmark Dalam Menghadapi Ancaman Pemanasan Global.”

eksistensi, baik bagi kawasan, negara, pemerintah, maupun masyarakat. Ancaman eksistensi ini dapat melegitimasi *extraordinary measures* (tindakan luar biasa) untuk menghadapi ancaman tersebut. Denmark membangun pulau buatan di wilayah utara sebagai wilayah penempatan 600 turbin angin raksasa yang diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2033. Tindakan ini dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen Denmark pada inovasi dan penerapan kebijakan berkelanjutan untuk menghapus citra sebagai negara penghasil emisi tertinggi di Uni Eropa pada 1987 silam. Artikel ini berfokus pada analisis alasan Denmark berkomitmen dalam isu lingkungan menggunakan teori keamanan Buzan dan realisasi implementasi kebijakan energi terbarukan Uni Eropa oleh Denmark. Tulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam memahami bagaimana ancaman lingkungan sebagai isu ancaman keamanan nasional dapat membuat negara mengeluarkan tindakan luar biasa. Perbedaan artikel dengan tulisan ini adalah artikel ini menganalisis bagaimana realisasi kebijakan energi terbarukan yang dilakukan oleh Denmark. Sedangkan tulisan ini menganalisis mengapa Denmark memutuskan untuk melanjutkan kermitraan energinya dengan Indonesia pada INDODEPP.

Literatur terakhir yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah “*Sino-Danish Cooperation in the Energy Transition*” oleh Birte Holst J. dan Stine Haakonsson.²⁸ Artikel ini menyoroti kerja sama Denmark dan Tiongkok yang sudah terjalin lama, yaitu sejak awal abad ke-20. Penguatan kerja sama kedua negara di berbagai sektor dan penandatanganan perjanjian strategis menandakan komitmen

²⁸ Birte Holst Jørgensen dan Stine Haakonsson, “Sino-Danish Cooperation in the Energy Transition,” dalam *The SDC International Report 2020 : Cooperating for Energy Transition*, ed. oleh Stine Haakonsson dkk. (Aarhus University Library, 2020), <https://doi.org/10.7146/aul.395.144>.

kedua negara. Kerja sama yang terjalin antara kedua negara tidak hanya terbatas pada aspek pemerintahan, namun juga meluas ke bidang inovasi dan riset, yaitu *mission innovation* dan *Clean Energy Ministerial*. Fokus dari kolaborasi kedua negara sejak tahun 2005 adalah riset teknologi dan sekitar 15% dari publikasi ilmiah internasional melibatkan kerja sama China dan Denmark dalam bidang ilmu teknik dan energi.²⁹ Jorgensen memaparkan keunggulan serta tantangan yang dihadapi oleh kedua negara, perbedaan budaya, tradisi, dan praktik kerja juga menjadi hambatan berarti yang memerlukan komitmen dan investasi jangka panjang demi membangun kolaborasi yang efektif.

Artikel ini memaparkan motivasi strategis, baik dari Denmark maupun China dalam pelaksanaan kerja sama serta memaparkan manfaat yang diperoleh dari kolaborasi kedua negara. Meskipun berfokus pada riset dan inovasi, kolaborasi kedua negara memengaruhi berbagai aspek lainnya seperti aspek sosial yang berguna bagi keberlanjutan hidup makhluk hidup. Artikel ini berkontribusi dalam membantu pemahaman mengenai dinamika kerja sama energi yang terjalin antara China dan Denmark yang dapat digunakan penulis sebagai referensi untuk melihat kebijakan luar negeri Denmark dengan negara lain terhadap energi terbarukan. Sedangkan tulisan ini berfokus pada kemitraan INDODEPP yang dimana Denmark sebagai aktor dominan dalam kemitraan ini

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Environmental Foreign Policy

Foreign Policy adalah konsep dalam Studi Hubungan Internasional yang merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh suatu negara sebagai bentuk

²⁹ Jørgensen dan Haakonsson, “Sino-Danish Cooperation in the Energy Transition.”

penyesuaian di tatanan global dengan tujuan mengubah perilaku negara lain.³⁰ Penelitian ini akan membahas mengenai pengambilan kebijakan luar negeri Denmark dalam melanjutkan kerja sama energi bersama Indonesia menggunakan kerangka pemikiran *Foreign Policy* yang dikemukakan oleh Paul G. Harris. Pada bukunya yang berjudul *Environmental Change and Foreign Policy: Theory and Practice* yang terbit pada tahun 2009, Harris melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri berdasarkan isu iklim suatu negara.³¹

Dalam bukunya, Paul G. Harris membagi level analisis faktor yang memengaruhi suatu kebijakan luar negeri menjadi tiga. Yang pertama yaitu *systemic theory* yang berfokus pada peran sistem internasional yang menentukan kepentingan suatu negara, membentuk identitas, dan juga membentuk tidak atau perilaku suatu negara. Level analisis kedua yaitu *societal theory* yang melihat kepada aktor domestik, yaitu masyarakat dalam suatu negara yang mempengaruhi faktor pengambilan kebijakan luar negeri. Dan level analisis terakhir adalah *state-centric theory* yang berfokus pada negara dan lembaga pemerintahan, partai politik, dan lembaga domestik lainnya yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri.

Dengan tiga level analisis tersebut, Paul G. Harris memaparkan tiga pendekatan berbeda untuk menjelaskan masing-masing aspek dalam teori ini, yaitu *power, interest, dan idea*. *Power based* mengacu pada analisis pengaruh kekuatan atau hegemoni yang dimiliki satu atau lebih aktor dominan dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Umumnya, aktor dominan yang dimaksud adalah Presiden, Perdana Menteri, politisi, maupun kelompok kepentingan lainnya yang memiliki

³⁰ A. S. Bojang, “The Study of Foreign Policy in International Relations,” *Journal of Political Sciences & Public Affairs* 6 (2018).

³¹ Paul G. Harris, *Environmental Change and Foreign Policy: Theory and Practice* (Routledge, 2009).

otoritas dominan sehingga berpengaruh besar pada suatu pengambilan kebijakan luar negeri. Pendekatan kedua adalah *interest based* yang berfokus pada analisis kepentingan dari kelompok-kelompok pengambil kebijakan. Menurut Paul G. Harris, dalam aspek *interest based* ingin melihat tawar menawar yang terjadi dalam suatu pengambilan kebijakan luar negeri iklim dari berbagai kelompok. Dan pendekatan terakhir adalah *ideas based* yang menganalisis ide-ide mengenai isu lingkungan mempengaruhi tindakan suatu negara.

Penelitian ini mengadopsi teori state-centric berbasis ide yang dikembangkan oleh Paul G. Harris sebagai kerangka konsep utama untuk menganalisis faktor pendorong Denmark dalam melanjutkan kerja sama energi dengan Indonesia melalui INDODEPP. Teori ini relevan untuk mempelajari kebijakan luar negeri terkait lingkungan, khususnya isu perubahan iklim, karena tekanan bahwa keputusan negara tidak hanya didorong oleh faktor-faktor material seperti kekuasaan ekonomi atau tekanan internasional, melainkan oleh ide, norma, dan keyakinan internal yang membentuk identitas dan aksi negara. Dalam konteks global yang semakin kompleks, di mana perubahan iklim memerlukan komitmen jangka panjang, teori Harris menawarkan lensa analitis yang holistik untuk memahami mengapa negara seperti Denmark memilih untuk mempertahankan program bilateral seperti INDODEPP meskipun tantangan seperti pandemi atau ketegangan geopolitik. Konsep ini menghasilkan matriks 3x3 sebagai alat analisis utama. Dengan menggunakan level analisis negara atau pada bukunya yang Paul G. Harris sebut dengan *state-centric theory*, penelitian ini akan melihat bagaimana negara sebagai aktor dipengaruhi pendekatan dalam pengambilan kebijakan luar negerinya, yaitu *ideas-based stater-centric theory*.

Pendekatan *ideas-based state-centric theory* menawarkan fokus analisis kepada aspek ide, nilai, dan diskurus yang dimiliki suatu negara, serta bagaimana aspek tersebut mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negerinya. Dengan menekankan analisis terletak pada ide, nilai, dan diskursus mengenai lingkungan dan energi, pendekatan ini bertujuan menganalisis bagaimana norma lingkungan mempengaruhi tindakan suatu negara pada kebijakan luar negerinya. Karena bersifat state-centric, teori ini berfokus pada peran negara sebagai aktor utama dalam merumuskan kebijakan luar negeri, tetapi tetap berbasis ide. Dimana ide-ide berbasis lingkungan tersebut menjadi pendorong dominan bagi negara dalam merumuskan kebijakan tertentu.

Para ahli menyebutkan bahwa terdapat beberapa pendekatan untuk menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara berdasarkan ide. Pendekatan tersebut adalah prinsip keyakinan, keyakinan kausal, dan pandangan dunia. Pendekatan ini nantinya akan mengarahkan pembuat kebijakan kepada satu roadmap atau peta jalan yang berkontribusi pada pencapaian hasil yang efisien tanpa adanya keseimbangan yang unik, sering kali menghasilkan kebijakan yang tanpa inovasi. Selain itu, menurut Paul G. Harris dalam *ideas-based state-centric theory* juga dibutuhkannya ruang bagi ilmu penggerahan untuk menganalisis kebijakan iklim suatu negara. Kebijakan iklim lebih bergantung kepada ilmu pengetahuan dan bukti nyata dibanding beberapa isu lainnya.³²

Pendekatan *ideas-based state-centric theory* menyoroti bahwa ide-ide tersebut tidak muncul secara acak, melainkan berasal dari sistem kepercayaan yang

³² John Barkdull dan Paul G. Harris, “Environmental Change and Foreign Policy: A Survey of Theory,” *Global Environmental Politics* 2, no. 2 (2002): 63–91, <https://doi.org/10.1162/15263800260047835>.

tersebar di masyarakat dan dipengaruhi oleh ideologi, norma internasional, serta pandangan kolektif tentang peran negara dan lingkungan. Aspek penting lainnya adalah bahwa ide-ide ini dapat membentuk persepsi tentang ancaman, peluang, dan apa yang dianggap sebagai kepentingan nasional, sehingga memotivasi negara untuk berpartisipasi dalam kerjasama internasional atau menolak aliansi tertentu terkait isu lingkungan. Selain itu, pendekatan ini juga melihat pentingnya pengaruh narasi, keyakinan, dan identitas nasional dalam menentukan sikap negara terhadap kerjasama global, konservasi, dan pengaturan sumber daya alam. Lebih jauh lagi, ide-ide ini dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan melalui proses sosial dan politik yang kompleks, termasuk di tingkat elit dan masyarakat umum

Ilmu pengetahuan memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri lingkungan suatu negara melalui proses penyebaran, validasi, dan penerimaan informasi dan data ilmiah yang mempengaruhi pandangan, persepsi, dan norma yang dianut oleh pengambil kebijakan dan masyarakat.³³ Pengetahuan ilmiah dapat memperkuat atau mengubah keyakinan dasar tentang isu-isu lingkungan, seperti dampak perubahan iklim, keberlanjutan sumber daya alam, dan risiko ekologis, sehingga memotivasi negara untuk bertindak sesuai dengan temuan ilmiah tersebut. Selain itu, ilmu pengetahuan juga berfungsi sebagai sumber legitimasi dan kredibilitas dalam argumen politik, yang dapat memperkuat posisi negara dalam negosiasi internasional atau mendorong adopsi kebijakan tertentu. Bila ilmuwan dan ahli terlibat aktif dalam menyusun kebijakan dan mempresentasikan data yang jelas dan terpercaya, ini dapat meningkatkan kepercayaan pembuat kebijakan dan masyarakat terhadap perlunya tindakan

³³ Harris, *Environmental Change and Foreign Policy: Theory and Practice*.

tertentu, misalnya implementasi teknologi ramah lingkungan atau partisipasi dalam kerjasama global.

Aktor yang berperan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri lingkungan adalah para ilmuwan, ahli, dan lembaga penelitian, dan lembaga swadaya masyarakat yang memproduksi, menyebarkan, dan mengomunikasikan data serta pengetahuan ilmiah terkait isu-isu lingkungan. Aktor-aktor ini berfungsi sebagai "*knowledge brokers*" yang menghubungkan temuan ilmiah dengan pembuat kebijakan dan masyarakat luas.³⁴ Mereka berpengaruh dalam membentuk persepsi, norma, dan interpretasi tentang masalah lingkungan, serta memberi legitimasi terhadap kebijakan tertentu berdasarkan bukti ilmiah yang mereka hasilkan dan distribusikan. Kelompok-kelompok ini bisa termasuk lembaga-lembaga internasional penelitian, organisasi profesi ilmuwan, dan jaringan kolaborasi global yang memfokuskan pada pengembangan dan diseminasi ilmu pengetahuan terkait lingkungan. Peran utama aktor ini adalah memanfaatkan data dan pengetahuan untuk membentuk persepsi dan normatif sosial yang akhirnya mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan luar negeri negara terhadap isu lingkungan

Dengan menggunakan aspek-aspek analisis yang terdapat pada ideas-based state-centric theory, penulis mampu menganalisis apa faktor pendorong Denmark dalam melanjutkan kebijakan energi dengan Indonesia pada program INDODEPP. Penelitian ini melihat peran ide, norma, yang berpengaruh kepada pengambilan kebijakan luar negeri berbasis iklim Denmark. Peran ilmu pengetahuan juga berkontribusi bagi penentuan kebijakan luar negeri Denmark dalam INDODEPP, yang mana hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga non-govenrmental. Selain itu,

³⁴ Barkdull dan Harris, "Environmental Change and Foreign Policy."

penelitian ini juga melihat peran negara sebagai aktor utama mengintrepetasikan ide-ide tersebut kedalam kebijakan luar negerinya.

1.8 Metode Penelitian

Dalam studi Hubungan Internasional, untuk mendapatkan pengetahuan guna membantu berjalannya penelitian diperlukan serangkaian kegiatan yang disebut metode penelitian. Metode penelitian merupakan upaya mendapatkan data menggunakan cara ilmiah yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu. Cara ilmiah adalah kegiatan penelitian yang dilakukan itu didasarkan pada ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis agar memperoleh hasil data penelitian yang valid, reliabel, dan objektif.³⁵

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penilitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis menitik beratkan fokus pada penjelasan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan suatu fenomena penelitian. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif umumnya digunakan untuk menemukan, menggambarkan, menganalisis, dan menyelidiki berbagai perilaku suatu objek. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif sangat umum digunakan dalam menelaah fenomena sosial, sehingga kedua metode ini dapat dengan baik menganalisa pengambilan kebijakan Denmark dalam kerjasama INDODEPP dengan Indonesia.

³⁵ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Harfa Creative, 2023).

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan temporal yang ditetapkan dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Tahun 2020 dipilih sebagai titik awal karena pada tahun tersebut kerja sama (INDODEPP) mulai dirumuskan secara resmi oleh kedua negara. Tahun ini menandai fase awal dari pembentukan kerangka kerja sama bilateral di bidang energi terbarukan antara Indonesia dan Denmark, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Adapun tahun 2025 dijadikan sebagai batas akhir karena merupakan tahun berakhirnya periode kerja sama INDODEPP sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kerja sama kedua negara. Penetapan rentang waktu ini dimaksudkan untuk memberikan ruang lingkup kajian yang spesifik dan relevan terhadap dinamika, implementasi, serta capaian kerja sama selama lima tahun masa berlangsungnya program tersebut.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan objek yang perlakunya akan dideskripsikan, dijelaskan, dan diasumsikan sebagai akibat dari suatu fenomena itu dapat terjadi. Unit analisis pada penelitian ini adalah faktor pengambilan kebijakan luar negeri Denmark dalam melanjutkan kerja sama dengan Indonesia pada INDODEPP. Unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi unit analisis yang akan digunakan, dan unit eksplanasi pada penelitian ini adalah kerja sama antara Indonesia-Denmark yang sudah terjalin lama dalam bidang energi. Tidak hanya itu, dalam penelitian ini juga terdapat level analisis yang merupakan tingkatan objek yang menjadi fokus utama dalam pembahasan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan level analisis negara sebagai pembuat kebijakan

mengingat kerja sama yang telah terjalin cukup lama antara kedua negara dan Sebagian besar tujuan kerja sama adalah demi memenuhi kebutuhan energi nasional Indonesia.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membutuhkan data untuk menunjang kevalidan informasi sebagai bahan materi. Dalam upaya mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Studi kepustakaan adalah berbagai usaha yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan fenomena relevan dengan topik penelitian. Sumber data dari studi kepustakaan dapat ditemukan di berbagai tulisan, mulai dari laporan penelitian, peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah, ensiklopedia, artikel, maupun sumber bacaan lainnya baik yang tercetak maupun elektronik.³⁶ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari situs resmi seperti, *Sustainable Development Goals website*, *Tempo*, *State of Green platform*, dan *BBC*.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Menurut Bagdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang didapatkan dari wawancara, catatan lapangan dan sumber lain secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti terkait materi tersebut sehingga mempermudah penyajian data kepada orang lain.³⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman

³⁶ Widiarsa, “Kajian pustaka (literature review) sebagai layanan intim Pustakawan berdasarkan kepakaran dan minat Pemustaka,” *Media Informasi* 28, no. 1 (2019): 111–24, <https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>.

³⁷ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Pustaka Ilmu, 2020).

dalam bukunya yang membagi teknik analisis data ke dalam tiga model interaktif, yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing and verification*.³⁸

1. Data Reduction

Proses ini merupakan tahap awal dari teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Tahap ini mencakup pengumpulan, pemfokusan, pemilihan, dan seleksi data yang didapatkan selama melakukan studi kepustakaan untuk menghasilkan data. Data yang dikumpulkan diperoleh dari laporan, dokumen, transkrip, maupun sumber data empiris lainnya. Penulis mengumpulkan berbagai macam bacaan yang relevan dengan topik dan fenomena yang akan diungkap dalam penelitian ini, yaitu faktor pendorong kebijakan luar negeri Denmark dalam melanjutkan kerja sama INDODEPP dengan Indonesia berdasarkan ide untuk setelahnya diseleksi dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian nantinya.

2. Data Display

Setelah proses *data reduction* selesai, tahapan selanjutnya yang akan penulis lakukan adalah *data display* atau menyajikan data yang sudah diseleksi dan diorganisir pada tahap sebelumnya ke dalam penelitian ini. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, maka data akan disajikan dalam bentuk kalimat sistematis dan mudah dipahami.

3. Conclusion Drawing and Verification

Setelah mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi relevan dan disajikan menggunakan kalimat sistematis, baik itu data utama maupun

³⁸ Matthew B. Miles dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3 ed. (Sage Publications, 2014).

tambahan, informasi yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan kerangka teori yang penulis pilih agar penelitian ini sistematis dan linear.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, jenis dan pendekatan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal dan landasan teoretis dari penelitian yang dilakukan.

BAB II : DENMARK DAN AGENDA LINGKUNGAN GLOBAL DALAM PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN

Bab ini menguraikan bagaimana dinamika energi global menjadi faktor utama yang mendorong negara-negara, termasuk Denmark, untuk menyesuaikan kebijakan luar negerinya. Dengan melihat isu lingkungan global, bab ini menguraikan strategi energi nasional Denmark yang berfokus pada inovasi teknologi, dekarbonisasi, serta pencapaian target net-zero emission. Bab ini juga mengkaji posisi Denmark sebagai mitra pembangunan dalam kerja sama energi internasional.

BAB III : KERJASAMA ENERGI DENMARK-INDONESIA MELALUI INDODEPP

Bab ini membahas lebih dalam tentang kerja sama strategis dalam program INDODEPP sebagai bentuk konkret dari kolaborasi energi antara kedua negara. Pembahasan mencakup latar belakang dan tujuan program, struktur kelembagaan

kerja sama, serta inisiatif-inisiatif yang telah dan sedang dijalankan. Fokus juga diberikan pada posisi Indonesia sebagai mitra strategis Denmark dalam kawasan Asia Tenggara. Analisis dilakukan terhadap kepentingan kedua negara, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama, termasuk aspek teknis, politik, dan kelembagaan.

BAB IV : ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI DENMARK DALAM MELANJUTKAN KERJA SAMA INDODEPP DENGAN INDONESIA

Bab ini berisikan analisis terhadap proses pengambilan keputusan Denmark dalam kerja sama INDODEPP, dengan menggunakan pendekatan Environmental Foreign Policy yang dikemukakan oleh Paul G. Harris. Analisis difokuskan pada identifikasi aktor utama dalam kebijakan luar negeri Denmark, baik institusi negara maupun non-negara, serta interaksi antar aktor dalam proses formulasi kebijakan.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang memuat kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, serta saran-saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian. Kesimpulan dirumuskan secara ringkas dan menyeluruh sebagai gambaran dari keseluruhan pembahasan skripsi.